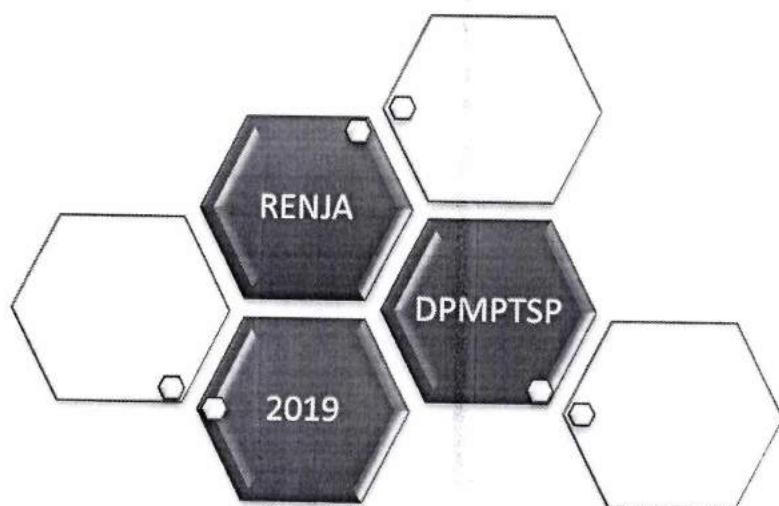




RENCANA KERJA TAHUN 2019

RENCANA KERJA
(RENJA)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG**

**Jl. Jend. Panjaitan No. 89 Lumajang
Telp. (0334) 889822, Fax. (0334) 894444**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lumajang tahun 2019 ini dengan baik.

Rencana Kerja di buat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang di tahun 2019. Tentunya hal tersebut dibutuhkan perencanaan kerja yang baik agar sasaran dan tujuan dapat berjalan dengan lancar.

Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2019 ini. Semoga rencana kerja ini bisa terlaksana dengan baik.

Lumajang, 23 APR 2019

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LUMAJANG

Sekretaris



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaianan Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	9
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD	10
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	11
3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	11
3.2 Program dan Kegiatan	12
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	13
BAB V PENUTUP.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang dibuat oleh Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang untuk mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Rencana kerja ini merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis 2018-2023 dan awal dari kebijakan selama lima tahun mendatang.

Dalam hal menyusun rencana kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan tentu melalui proses yang sesuai dengan tupoksi perangkat daerah itu sendiri. Dengan menerjemahkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta memperhatikan landasan hukum yang mendasari maka program dan kegiatan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Program dan Kegiatan perangkat daerah merupakan kumpulan dari program dan kegiatan masing-masing sekretariat dan bidang pada perangkat daerah dan harus dipertanggungjawabkan setiap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud saat tahun anggaran berakhir.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang untuk mendukung prioritas pembangunan daerah telah ditetapkan setiap tahun dan mengacu pada Review Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan RKPD yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun pemerintah pusat.

Memperhatikan landasan perencanaan suatu pembangunan yang menjadi dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP), serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJP, RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan lima tahunan diperlukan rencana penganggaran setiap tahunnya yang dituangkan dalam renstra perangkat daerah. Hal tersebut untuk memudahkan menghitung kebutuhan dan ketersediaan dana di dalam APBD.

Selanjutnya RKPD memiliki nilai strategis yang merupakan acuan Kepala Daerah dalam rangka menyusun Kebijakan anggaran yang menjadi dasar penetapan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 serta menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019. Disamping itu juga menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2019.

Rancangan RKPD pada intinya menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan masukan dan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan harmonisasi serta sinergitas terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan memuat rencana kinerja pembangunan yang ingin dicapai, fenomena yang ada dan isu-isu strategis yang akan dihadapi.

Rencana Kerja sebagai dokumen rencana tahunan menggambarkan tentang:

- a. Arahan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. Merupakan acuan bagi Kepala Perangkat Daerah untuk menentukan rencana kebutuhan belanja kegiatan dan program serta pencapaian rencana pendapatan;
- c. Merupakan alat evaluasi pelaksanaan kinerja sejauh mana tercapainya hasil kegiatan dan program dalam tahun dimaksud.

Analisis kinerja Perangkat Daerah merupakan evaluasi terhadap target capaian kinerja dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak atas kinerja tersebut dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam menyusun

program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan kondisi riil kebutuhan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan memberikan kontribusi pada penyusunan RAPBD yang akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang tahun 2018 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2023.

- b. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka pendek;
- c. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu;
- d. Mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja;
- e. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana dalam pelayanan investasi dan pelayanan publik.
- f. Merupakan tolok ukur keberhasilan pelayanan investasi dan pelayanan publik.

Adapun tujuannya:

- a. Merupakan implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi yang diwujudkan dalam jangka waktu pendek;
- b. Merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang berkelanjutan;
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. Mendorong organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang dicapai di masa depan, agar eksistensi organisasi tetap terpelihara melalui strategi yang rasional dan logis;
- e. Memberi jaminan yang kongkrit, jelas dan logis kepada lingkungan internal maupun eksternal, dalam kaitannya dengan aktivitas pelayanan investasi dan pelayanan perizinan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisa
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaianan Renstra Perangkat Daerah Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan awal RKPD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
memuat uraian rencana program, kegiatan dan pendanaan.
- BAB V PENUTUP, memuat ringkasan singkat yang dimaksud dan tujuan
penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaianan Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lumajang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

(Tabel. T-C. 29)

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam analisa kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, telah dijabarkan indikator penetapan kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun 2019. *(Tabel T-C. 30)*

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategi berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, dengan berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu banyak sekali tantangan dan hambatan yang dilalui oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tetapi dengan berjalannya waktu dengan segenap kemampuan yang ada selalu berusaha untuk menunjukkan kinerja menjadi lebih baik. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain

Dalam hal ini isu-isu strategis yang ada pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah :

1. Belum seluruhnya izin di dearah terintegrasi dalam sistem OSS
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang belum terintegrasi dalam sistem OSS;
3. Belum seluruhnya masyarakat memahami tata cara pengisian dan penentuan jenis izin berusaha berdasar KBLI-nya secara mandiri, karena salah dalam penentuan KBLI-nya maka salah juga dalam penentuan jenis produk izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS
4. Masyarakat masih belum memahami tentang cara pemenuhan komitmen untuk pengefektifan perizinannya

TABEL T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s/d Tahun 2018
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

KODE		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2018			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
URUSAN											
PENANAMAN MODAL											
1 18 1 18 01 02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	97.38	100%	94.93	94.93	100%	193.31	193.31	
1 18 1 18 01 02 021	Pelayanan Administrasi dan Operasional kantor	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	29 jenis	0.00	100%	94.93	94.93	31 jenis	0	0	
1 18 1 18 01 00 1 5 2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	99.94	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 01 00 2 5 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		0	91.55	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 01 00 7 5 2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah		0	99.73	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 01 00 8 5 2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		0	100	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 01 01 0 5 2	Penyediaan Alat Tulis Kantor		0	98,13	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 01 01 1 5 2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		0	99,02	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 01 01 2 5 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0	85,82	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 01 01 5 5 2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0	100	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 01 01 6 5 2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0	97,91	0	0	0	0	0	0	

KODE								Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2018			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
													Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	18	1	18	01	01	7	5	2	Penyediaan Makanan dan Minuman	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1	18	1	18	01	01	8	5	2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	3	4	0	99,80	0	0	0	0	0		
1	18	1	18	01	01	9	5	2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	3	4	0	100	0	0	0	0	0		
1	18	1	18	01	02	0	5	2	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	3	4	0	100	0	0	0	0	0		
1	18	1	18	01	02			2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3	4	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan layak	100%	94.07	0.98	84.73	86.46	100%	179.80	179.8
1	18	1	18	01	02	045		2	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Aparatur	3	4	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	12 unit	94.39	0.98	96.56	0.00	15 unit	0	0
1	18	1	18	01	02	046		2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	3	4	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	75 unit	94.02	0.98	63.03	64.32	69 unit	0	0
1	18	1	18	02	00	8	5	2	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3	4	0	91,86	0	0	0	0	0	0	
1	18	1	18	02	02	2	5	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3	4	0	94,51	0	0	0	0	0	0	
1	18	1	18	02	02	4	5	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3	4	0	99,60	0	0	0	0	0	0	
1	18	1	18	02	02	4	5	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3	4	0	99,31	0	0	0	0	0	0	
1	18	1	18	02	02	4	5	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3	4	0	82,67	0	0	0	0	0	0	
1	18	1	18	02	02	4	5	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	3	4	0	96,93	0	0	0	0	0	0	
1	18	1	18	02	02	4	5	2	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	3	4	0	99,28	0	0	0	0	0	0	

KODE		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2018			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan											
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
1	18	1	18	02	02	4	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	0		
0	0	0	0	0	99,28	0	0	0								0	0	0	0		
1	18	1	18	02	02	4	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2	0	0	95,56	0	0	0	0	0	0	0	
1	18	1	18	02	02	4	5	2	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	0	0	95,56	0	0	0	0	0	0	0	
1	18	1	18	01	06				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2	Prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	100%	97.17	100%	96.64	96.64	100%	194.81	194.81		
1	18	1	18	01	06	001			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	2	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang disusun	1 dokumen	91.13	100%	96.42	96.42	1 dokumen	0	0	0	
1	18	1	18	01	06	002			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	2	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosisrealisasi anggaran yang disusun	2 dokumen	0	100%	78.50	78.50	2 dokumen	0	0	0	
1	18	1	18	01	06	003			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	Jumlah laporan keuangan tahun 2018 yang disusun	1 dokumen	96.47	100%	99.71	99.71	1 dokumen	0	0	0	
1	18	1	18	01	06	005			Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	2	Jumlah dokumen survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun	2 dokumen	100.00	100%	99.03	99.03	2 dokumen	0	0	0	
1	18	1	18	01	06	007			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	3	Jumlah dokumen perubahan RKA 2019 dan RKA 2020 yang tersusun	3 dokumen		100%	98.69	98.69	3 dokumen	0	0	0	
1	18	1	18	01	06	007			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	3		0	99.84	0	0	0	0	0	0	0	
1	18	1	18	01	06	007			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	3		0	99.84	0	0	0	0	0	0	0	
1	18	1	18	01	16				PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN	3	- Percentase izin usaha yang terbit	86%					85%	0	0	0	
											- Percentase izin non usaha yang terbit	83%	0	10%	15%	1.50	83%	0	0	0	
											- Percentase pengaduan yang diselesaikan	100%					100%	0	0	0	
1	18	1	18	01	16	001			Optimalisasi Perijinan Usaha	2	Jumlah ijin usaha yang dilayani	3400 ijin	0	100	89.94	0.90	3360 ijin	0	0	0	

KODE		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2018			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	18	1	18	01	16	002	Optimalisasi Perijinan Non Usaha	Jumlah ijin non usaha yang dilayani	900 ijin	0	100	97.83	0.98	840 ijin	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	18	1	18	01	16	003	Optimalisasi Penanganan Pengaduan dan Sistem Informasi	Jumlah pengaduan yang dilayani	10 pengaduan	0	100	16.12	0.16	5 pengaduan	0	0
1	18	1	18	02	17	004	Optimalisasi Peran Tim Pertimbangan Perijinan Terpadu		0	84,98	0	0	0	0	0	0
1	18	1	18	03	18	005	Penyusunan Laporan Kinerja Pelayanan Perijinan		0	97,44	0	0	0	0	0	0
1	18	1	18	04	19	006	Pengembangan Database Sistem Aplikasi Perijinan		0	89,78	0	0	0	0	0	0
1	18	1	18	05	20	007	PROGRAM OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERIJINAN		0	0	0	0	0	0	0	0
1	18	1	18	06	21	008	Workshop dan Review Ketentuan Perijinan		0	0	0	0	0	0	0	0
1	18	1	18	07	22	009	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASI PERIJINAN		0	93,61	0	0	0	0	0	0
1	18	1	18	08	23	010	Pembinaan dan Sosialisasi Perijinan		0	93,61	0	0	0	0	0	0
1	18	1	18	09	24	011	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT		0	61,34	0	0	0	0	0	0
1	18	1	18	10	25	012	Pembinaan Pelayanan Publik		0	61,34	0	0	0	0	0	0
1	18	1	18	01	16		PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Percentase peningkatan investasi di Kabupaten Lumajang	0.65%	0.00	14%	70.89	506.36	0.00%	70.89	10906.15385
1	18	1	18	01	16	009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Pelaku Usaha yang dipantau	125 pelaku usaha	0.00	100	68.17	0.68	116 pelaku usaha	0	0
1	18	1	18	01	16	017	Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	100 investor	0.00	100		0.00	75 investor	0	0
1	18	1	18	01	16	020	Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan dan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah data potensi yang dikaji dari OPD teknis terkait	3 potensi	0.00	100	35.72	0.36	2 potensi	0	0

KODE		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2018			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1 18 1 18 02 17 021	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal		0	0.00	100	14.50	0.15	0	0	0	
1 18 1 18 03 18 022	Sosialisasi Kebijakan Investasi Penanaman Modal		0	0.00	100	64.76	0.65	0	0	0	
1 18 1 18 04 19 023	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal		0	0	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 05 20 024	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal		0	95,62	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 06 21 025	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI		0	80,85	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 07 22 026	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi		0	29,83	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 08 23 027	Penyelenggaraan Pameran Investasi		0	84,68	100	75.24	0.75	0	0	0	
1 18 1 18 09 24 028	Pemetaan Investasi Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 10 25 029	Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Potensi Investasi Daerah		0	77,32	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 11 26 030	PROGRAM PENyiAPAN POTENSI SUMBERDAYA DAN PRASARANA DAERAH		0	96,08	0	0	0	0	0	0	
1 18 1 18 12 27 031	Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi		0	96,08	0	0	0	0	0	0	

TABEL T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

5. Pemenuhan komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan sistem OSS;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok yang timbul dari adanya penerapan sistem OSS pada pelayanan berizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang yaitu lambatnya pelayanan perizinan yang dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha karena belum dipahaminya seluruh proses pelayanan perizinan OSS baik tata cara pengisian format perizinan OSS secara elektronik, penentuan permintaan izin berusaha sesuai dengan Kelompok Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI), pemenuhan komitmen perizinan OSS dan pelaporan usaha setelah diterbitkan izin OSS melalui format Laporan Kegiatan Penanaman Modal bagi perusahaan yang wajib melakukan pelaporan LKPM secara elektronik.

Belum terealisasi sistem pelayanan secara online searah sepenuhnya maka perlu adanya perbaikan sistem dan prosedur pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengurus izin dari sisi biaya, waktu dan prosedur dalam pemrosesan berkas perizinan yang bisa lebih dioptimalkan lagi serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemahaman pentingnya perizinan, Dengan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada waktu mendatang akan memperbaiki kinerjanya dengan melakukan perancanaan yang baik yang sejalan dengan RPJMD yang telah direncanakan oleh Kabupaten Lumajang.

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2019 dapat dijelaskan pada (**Tabel T-C. 31**).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari pelaksana Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. (**Tabel T-C. 32**)

TABEL T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN	DPMPTS P	- Persentase izin usaha yang terbit	85%	394,390,000.00	PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN	DPMPTS P	- Persentase izin usaha yang terbit	85%	394,390,000.00		
			- Persentase izin non usaha yang terbit	83%				- Persentase izin non usaha yang terbit	83%			
			- Persentase pengaduan yang diselesaikan	100%				- Persentase pengaduan yang diselesaikan	100%			
a	Optimalisasi Perijinan Usaha	DPMPTS P	Jumlah ijin usaha yang dilayani	3400 ijin	321,650,000.00	Optimalisasi Perijinan Usaha	DPMPTS P	Jumlah ijin usaha yang dilayani	3400 ijin	321,650,000.00		
b	Optimalisasi Perijinan Non Usaha	DPMPTS P	Jumlah ijin non usaha yang dilayani	900 ijin	60,800,000.00	Optimalisasi Perijinan Non Usaha	DPMPTS P	Jumlah ijin non usaha yang dilayani	900 ijin	60,800,000.00		
c	Optimalisasi Penanganan Pengaduan dan Sistem Informasi	DPMPTS P	Jumlah pengaduan yang dilayani	10 pengaduan	11,940,000.00	Optimalisasi Penanganan Pengaduan dan Sistem Informasi	DPMPTS P	Jumlah pengaduan yang dilayani	10 pengaduan	11,940,000.00		
2	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	DPMPTS P	- Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Lumajang	0.60%	389,087,600.00	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	DPMPTS P	- Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Lumajang	0.60%	389,087,600.00		
a	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	DPMPTS P	Jumlah Pelaku Usaha yang dipantau	125 pelaku usaha	71,195,000.00	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	DPMPTS P	Jumlah Pelaku Usaha yang dipantau	125 pelaku usaha	71,195,000.00		
b	Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal	DPMPTS P	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	100 investor	309,122,600.00	Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal	DPMPTS P	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	100 investor	309,122,600.00		
c	Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan dan Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTS P	Jumlah data potensi yang dikaji dari OPD teknis terkait	3 potensi	8,770,000.00	Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan dan Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTS P	Jumlah data potensi yang dikaji dari OPD teknis terkait	3 potensi	8,770,000.00		
3	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	DPMPTS P	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	819,287,943.00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	DPMPTS P	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	819,287,943.00		
a	Pelayanan Administrasi dan Operasional kantor	DPMPTS P	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	29 jenis	819,287,943.00	Pelayanan Administrasi dan Operasional kantor	DPMPTS P	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	29 jenis	819,287,943.00		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	DPMPTS P	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan layak	100%	528,888,010.00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	DPMPTS P	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan layak	100%	528,888,010.00		
a	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	DPMPTS P	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	12 unit	308,988,010.00	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	DPMPTS P	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	12 unit	308,988,010.00		
b	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	DPMPTS P	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	75 unit	219,900,000.00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	DPMPTS P	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	75 unit	219,900,000.00		
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	DPMPTS P	Prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	100%	23,044,000.00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	DPMPTS P	Prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	100%	23,044,000.00		
a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	DPMPTS P	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang disusun	1 dokumen	3,564,000.00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	DPMPTS P	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang disusun	1 dokumen	3,564,000.00		
b	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	DPMPTS P	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosisrealisasi anggaran yang disusun	2 dokumen	2,125,000.00	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	DPMPTS P	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosisrealisasi anggaran yang disusun	2 dokumen	2,125,000.00		
c	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	DPMPTS P	Jumlah laporan keuangan tahun2018 yang disusun	1 dokumen	5,840,000.00	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	DPMPTS P	Jumlah laporan keuangan tahun2018 yang disusun	1 dokumen	5,840,000.00		
d	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	DPMPTS P	Jumlah dokumen survey Indeks Kepuasan Masyarakatyang disusun	2 dokumen	3,470,000.00	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	DPMPTS P	Jumlah dokumen survey Indeks Kepuasan Masyarakatyang disusun	2 dokumen	3,470,000.00		
e	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	DPMPTS P	Jumlah dokumen perubahan RKA 2019 dan RKA 2020 yang tersusun	3 dokumen	8,045,000.00	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	DPMPTS P	Jumlah dokumen perubahan RKA 2019 dan RKA 2020 yang tersusun	3 dokumen	8,045,000.00		

TABEL T-C. 32
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN	DPMPTSP	- Persentase izin usaha yang terbit	85%	394,390,000.00
			- Persentase izin non usaha yang terbit	83%	
			- Persentase pengaduan yang diselesaikan	100%	
a	Optimalisasi Perijinan Usaha	DPMPTSP	Jumlah ijin usaha yang dilayani	3400 ijin	321,650,000.00
b	Optimalisasi Perijinan Non Usaha	DPMPTSP	Jumlah ijin non usaha yang dilayani	900 ijin	60,800,000.00
c	Optimalisasi Penanganan Pengaduan dan Sistem Informasi	DPMPTSP	Jumlah pengaduan yang dilayani	10 pengaduan	11,940,000.00
2	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	DPMPTSP	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Lumajang	0.60%	389,087,600.00
a	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang dipantau	125 pelaku usaha	71,195,000.00
b	Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	100 investor	309,122,600.00
c	Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan dan Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah data potensi yang dikaji dari OPD teknis terkait	3 potensi	8,770,000.00
3	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	DPMPTSP	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	819,287,943.00
a	Pelayanan Administrasi dan Operasional kantor	DPMPTSP	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	29 jenis	819,287,943.00
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	DPMPTSP	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan layak	100%	528,888,010.00
a	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	DPMPTSP	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	12 unit	308,988,010.00
b	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	DPMPTSP	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	75 unit	219,900,000.00
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	DPMPTSP	Prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	100%	23,044,000.00
a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	DPMPTSP	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang disusun	1 dokumen	3,564,000.00
b	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	DPMPTSP	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosisrealisasi anggaran yang disusun	2 dokumen	2,125,000.00
c	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	DPMPTSP	Jumlah laporan keuangan tahun2018 yang disusun	1 dokumen	5,840,000.00
d	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	DPMPTSP	Jumlah dokumen survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun	2 dokumen	3,470,000.00
e	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	DPMPTSP	Jumlah dokumen perubahan RKA 2019 dan RKA 2020 yang tersusun	3 dokumen	8,045,000.00

TABEL T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2019					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1	18	1	18	01	16	PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN	- Persentase izin usaha yang terbit	DPMPTSP	85%	394,390,000.00				
							- Persentase izin non usaha yang terbit		83%					
							- Persentase pengaduan yang diselesaikan		100%					
1	18	1	18	01	16	001	Optimalisasi Perijinan Usaha	Jumlah ijin usaha yang dilayani	DPMPTSP	3400 ijin	321,650,000.00	APBD	3400 ijin	321,650,000.00
1	18	1	18	01	16	002	Optimalisasi Perijinan Non Usaha	Jumlah ijin non usaha yang dilayani	DPMPTSP	900 ijin	60,800,000.00	APBD	900 ijin	60,800,000.00
1	18	1	18	01	16	003	Optimalisasi Penanganan Pengaduan dan Sistem Informasi	Jumlah pengaduan yang dilayani	DPMPTSP	10 pengaduan	11,940,000.00	APBD	10 pengaduan	11,940,000.00
1	18	1	18	01	16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Percentase peningkatan investasi di Kabupaten Lumajang	DPMPTSP	0.60%	389,087,600.00	APBD	0.60%	389,087,600.00	
1	18	1	18	01	16		Jumlah Pelaku Usaha yang dipantau	DPMPTSP	125 pelaku usaha	71,195,000.00	APBD	125 pelaku usaha	71,195,000.00	
1	18	1	18	01	16	017	Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	DPMPTSP	100 investor	309,122,600.00	APBD	100 investor	309,122,600.00
1	18	1	18	01	16	020	Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan dan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah data potensi yang dikaji dari OPD teknis terkait	DPMPTSP	3 potensi	8,770,000.00	APBD	3 potensi	8,770,000.00
1	18	1	18	01	02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Percentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	DPMPTSP	100%	819,287,943.00	APBD	100%	819,287,943.00	
1	18	1	18	01	02		Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	DPMPTSP	29 jenis	819,287,943.00	APBD	29 jenis	819,287,943.00	
1	18	1	18	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan layak	DPMPTSP	100%	528,888,010.00	APBD	100%	528,888,010.00	
1	18	1	18	01	02		Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	DPMPTSP	12 unit	308,988,010.00	APBD	12 unit	308,988,010.00	
1	18	1	18	01	02	046	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	DPMPTSP	75 unit	219,900,000.00	APBD	75 unit	219,900,000.00
1	18	1	18	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	DPMPTSP	100%	23,044,000.00	APBD	100%	23,044,000.00	
1	18	1	18	01	06		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang disusun	DPMPTSP	1 dokumen	3,564,000.00	APBD	1 dokumen	3,564,000.00	
1	18	1	18	01	06		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosisrealisasi anggaran yang disusun	DPMPTSP	2 dokumen	2,125,000.00	APBD	2 dokumen	2,125,000.00	
1	18	1	18	01	06	003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan tahun2018 yang disusun	DPMPTSP	1 dokumen	5,840,000.00	APBD	1 dokumen	5,840,000.00
1	18	1	18	01	06	005	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun	DPMPTSP	2 dokumen	3,470,000.00	APBD	2 dokumen	3,470,000.00
1	18	1	18	01	06	007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA 2019 dan RKA 2020 yang tersusun	DPMPTSP	3 dokumen	8,045,000.00	APBD	3 dokumen	8,045,000.00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan terformulasikannya tujuan strategis maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki.

Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program / kegiatan.

MISI – TUJUAN

No.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Reformasi Birokrasi Yang Efektif, Profesional, Akuntabel, Dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Benar Dan Bersih (Good And Clean Governance)	Meningkatnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

TUJUAN – SASARAN

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2019 tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang untuk mengimplementasikan rencana strategis.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berikut adalah penyusunan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran di Tahun 2019 sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pelayanan Administrasi dan Operasional perkantoran	848.151.943,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan / Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	201.673.010,00
		2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	184.655.000,00
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	3.564.000,00
		2. Penyusunan laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis realisasi Anggaran	2.125.000,00
		3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.840.000,00
		4. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	3.470.000,00
		5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	17.695.000,00
4.		1. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	71.195.000,00
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	2. Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal	309.122.600,00
		3. Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Potensi investasi Daerah	8.770.000,00
5.	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	1. Optimalisasi Perijinan Usaha	384.276.000,00
		2. Optimalisasi Perijinan Non Usaha	87.190.000,00
		3. Optimalisasi Penanganan Pengaduan dan Sistem Informasi	26.970.000,00

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan, sebesar **Rp 3.693.584.717,00** yaitu untuk Belanja Langsung sebesar **Rp 2.154.697.553,00** dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp 1.538.887.164,00** adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT Tahun 2019.

BAB IV

RENCAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lumajang tahun 2019 terdiri dari :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi.
2. Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan.

Selain program dan kegiatan utama diatas, terdapat juga program dan kegiatan penunjang yang mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
 - b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP
 - b. Penyusuna Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Penyusuna Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - d. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
 - e. Penyusunan Rencana Kerja
 - f. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Anggaran yang dia lokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun anggaran 2019 telah ditetapakan, sebesar Rp 3.693.584.717,00 yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp 2.154.697.553,00 dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.538.887.164,00.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Lumajang.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG
RENCANA KERJA PROGRAM , KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN
TAHUN 2019

NO	TUJUAN		SASARAN			NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	2019		Bidang/Bag Penganggung jawab
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	TARGET 2019					Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82 INDEKS	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100%	819,287,943.00	SEKRETARIS
						a	Pelayanan Admistrasi dan Operasional kantor	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Jenis	29 jenis	819,287,943.00	KA. SUB. BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan layak	%	100%	528,888,010.00	SEKRETARIS
						a	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	Unit	12 unit	308,988,010.00	KA. SUB. BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						b	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	Unit	75 unit	219,900,000.00	KA. SUB. BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	%	100%	23,044,000.00	SEKRETARIS
						a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang disusun	Dokumen	1 dokumen	3,564,000.00	KA. SUB. BAG KEUANGAN
						b	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosisrealisasi anggaran yang disusun	Dokumen	2 dokumen	2,125,000.00	KA. SUB. BAG KEUANGAN

NO	TUJUAN		SASARAN			NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	2019		Bidang/Bag Penganggung jawab
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	TARGET 2019					Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						c	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan tahun2018 yang disusun	Dokumen	1 dokumen	5,840,000.00	KA. SUB. BAG KEUANGAN
						d	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun	Dokumen	2 dokumen	3,470,000.00	KA. SUB. BAG KEUANGAN
						e	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA 2019 dan RKA 2020 yang tersusun	Dokumen	3 dokumen	8,045,000.00	KA. SUB. BAG KEUANGAN
						4	PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN	- Persentase izin usaha yang terbit - Persentase izin non usaha yang terbit - Persentase pengaduan yang diselesaikan	%	85% 83% 100%	394,390,000.00	KABID PTSP
						a	Optimalisasi Perijinan Usaha	Jumlah ijin usaha yang dilayani	Σ	3400 ijin	321,650,000.00	KASI PELAYANAN PERIZINAN USAHA
						b	Optimalisasi Perijinan Non Usaha	Jumlah ijin non usaha yang dilayan	Σ	900 ijin	60,800,000.00	KASI PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA
						c	Optimalisasi Penanganan Pengaduan dan Sistem Informasi	Jumlah pengaduan yang dilayani	Σ	10 pengaduan	11,940,000.00	KASI PENGADUAN DAN SISTEM INFORMASI
						5	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	- Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Lumajang	%	0.60%	389,087,600.00	KABID PENANAMAN MODAL
						a	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Pelaku Usaha yang dipantau	Σ	125 pelaku usaha	71,195,000.00	KASI PENGENDALIAN PELAKSANA PENAMAN MODAL
						b	Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	Σ	100 investor	309,122,600.00	KASI PROMOSI DAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
						c	Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan dan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah data potensi yang dikaji dari OPD teknis terkait	Σ	3 potensi	8,770,000.00	KASI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL